

---

**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
(RASKIN) DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG**

Hari Fabrian

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [ketapangbyan@gmail.com](mailto:ketapangbyan@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Hari Fabrian** : Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. **Skripsi.Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

Skripsi ini berjudul “Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor koordinasi apa saja yang menyebabkan pelaksanaan program raskin di Kecamatan Simpang Hulu belum erlaksana secara efektif. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program raskin antara lain jumlah yang tidak sesuai, salah sasaran, data penerima raskin dan keterlambatan pendistribusian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan Simpang Hulu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kesatuan tindakan yang masih kurang dalam bentuk pendistribusiannya kepada masyarakat sehingga terjadi keterlambatan dalam pendistribusiannya kepada masyarakat. Faktor kedua, komunikasi yang masih kurang dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui program raskin. Faktor ketiga, pembagian kerja yang hanya diserahkan kepada pihak Desa saja yang menyebabkan ketidak jelasanya tugas-tugas implementor.

**Kata kunci** : koordinasi, kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja.

**ABSTRACT**

**Hari Fabrian:** *Coordination in The Implementation Of The Rice Program For Poor Households In Simpang Hulu Subdistrict Ketapang County. Thesis. Pontianak. Government Science Study Program In Cooperation Between Tanjungpura University and Local Government of West Borneo.*

*The thesis is entitled “Coordination in The Implementation Of The Rice Program For Poor Households In Simpang Hulu Subdistrict Ketapang County”. The writing of the thesis is aimed to know what in Simpang Hulu Subdistrict has not been implementation effectively. The thesis is based on the matter of the implementing poor rice progra among other are inappropriate numbers, misdirected, the date of poor rice program receivers, and delays of distribution. The result of the research found that implementing the poorrice program has not been optimum yet influenced by first factor is less of unity of actions in distributing to the society so that the distribution of poor rice delayed to be distributed, the second factor less of communication to the society so that the society did not kwon the poor rice program, the third factor is division of work which is detegated to village only that cause the task vagueness of implementor.*

**Keyword:** *coordination, unity of action, communication and division of work.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di berbagai negara berkembang, mencakup lebih dari satu miliar penduduk dunia, terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani). Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung suatu resiko dan ketidak pastian masa depan perekonomian dunia.

Kerentanan dapat juga dikatakan merupakan kondisi dimana suatu keluarga miskin tidak memiliki kesiapan baik mental maupun material dalam menghadapi situasi sulit yang dialaminya. Kerentanan ini sering menimbulkan kondisi memprihatinkan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka makin rentan dan tidak berdaya. Sedangkan ketidak berdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus dimana elite desa dengan seandainya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjangkir bantuan yang sebenarnya diperuntukan untuk orang miskin contohnya seperti Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin).

Pelaksanaan kegiatan program sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan program yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan dan makmur. Pencapaian tujuan program tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu

dalam bentuk oprasional. Penyelenggaraan yang selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada pemilihan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah koordinasi dari para pelaksana program. Koordinasi merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan program atau unit kerja disuatu daerah guna mencapai tuntutan otonomi daerah guna mencapai tujuan program yang telah ditetapkan, sehingga tujuan program pada suatu daerah dapat tercapai.

Penyaluran Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudia diubah menjadi raskin mulai tahun 2002, raskin berubah fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RST-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasar. Dasar hukum yang menjadi peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah peraturan pemerintahan nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pengembangan nasional

untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragama serta tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Program pemerintah membantu masyarakat miskin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat miskin. Program raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya untuk kesejahteraan, meningkatkan ketahanan pangan, dan perlindungan kepada rakyat miskin. Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program atau kebijakan yang merupakan sasaran penting untuk mengurangi dampak kemiskinan yang dihadapi oleh kelompok miskin pada bidang sosial yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program raskin untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar masyarakat. Tetapi salah besar jika Raskin dianggap tidak bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan. Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas Raskin, hanya mereka tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu yang mendapatkan hak untuk menerima Raskin.

Kabupaten Ketapang tepatnya di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu merupakan salah satu di antara penerima beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN). Dalam prosesnya menurut penulis dari hasil pengamatan *pre survey* masih terdapat beberapa masalah, *pertama*, mengenai salah sasaran. Permasalahan *kedua*, Data Rumah Tangga (RTM) di Desa Balai Pinang belum sepenuhnya akurat sehingga masih ada penduduk miskin yang tidak terdata. Permasalahan *ketiga*, keterlambatan pendistribusian kepada masyarakat. Permasalahan *keempat*, jumlah beras yang dibagikan tidak tepat jumlah.

Hari Fabrian  
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

## 2. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan maka perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Maka penulisan ini difokuskan pada “Koordinasi Vertikal dalam proses pelaksanaan raskin”. Koordinasi Vertikal Adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawab secara langsung.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini ialah “Bagaimana Koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa Dalam Proses Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang?”

## 4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupate Ketapang?
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

## 5. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk mendalami ilmu dalam pengkajian khususnya ilmu manajemen pemerintahan. Selain itu penelitian ini nantinya

diharapkan mampu memberikan kontribusi dibidang studi tentang koordinasi. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi penelitian baru yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi instansi pemerintahan kecamatan, khususnya terkait dengan koordinasi camat dengan kepala desa dalam pelaksanaan program raskin, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.
2. Bagi penulis, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

## B. TEORI DAN METODE PENELITIAN

### 1. Konsep Teori

Pengkoordinasian merupakan bagian terpenting dari semua fungsi manajemen. Koordinasi merupakan suatu upaya penyesuaian atau penyeragaman bagian-bagian yang berbeda agar saling terkait guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsionalisme) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut James D. Thompson (dalam Handoko, 2003:196) koordinasi terdapat tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi yaitu :

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*poled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequintal interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

Menurut Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, sebagai berikut :

- a. Kesatuan tindakan  
Pada hakekatnya dalam sebuah organisasi diperlukannya kesadaran dari setiap anggota organisasi dan satuan organisasi guna saling menyesuaikan diri atau tugasnya. Hal ini diharapkan agar anggota dan satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep dari kesatuan tindakan merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin dalam memperoleh koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang telah direncanakan bersama anggota organisasi dan satuan organisasi, sehingga terdapat keserasian untuk mencapai hasil.
- b. Komunikasi  
Kata komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yang dalam bahasa latinnya mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan. Pada hakekatnya komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi guna meningkatkan hubungan pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan nama koordinasi, karena komunikasi

merupakan unit dalam organisasi untuk dapat dikoordinasikan rentang dimana sebagai besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

c. Pembagian kerja

Tujuan organisasi adalah mencapai tujuan bersama, dimana individu tidak dapat menyelesaikan dengan sendiri. Organisasi pada dasarnya mempunyai prinsip dalam pembagian kerja (division of labor). Prinsip pembagian kerja merupakan tujuan dalam suatu organisasi untuk dapat menghasilkan dengan baik dalam mencapai tujuan usaha yang hendak dilakukan dengan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan, agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis maka penulis menggunakan teori Hasibuan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. Teori Hasibuan tersebut dipilih penulis karena dianggap tepat oleh penulis dengan masalah yang terjadi di lapangan. Dengan kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja maka tujuan yang ingin dicapai pun akan efektif dan berjalan dengan baik.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan kembali kondisi nyata yang ada di lapangan (Sugiyono, 2007:23). Dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kebijakan dan pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan serta saran untuk membuat kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama serta untuk menjadi pembelajaran untuk pembuatan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini

menggunakan analisa kualitatif, analisa kualitatif adalah bagaimana peneliti mengelola dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk selanjutnya dapat diinterpretasikan sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

peneliti akan membahas mengenai koordinasi dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Dimana penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Camat Simpang Hulu dan dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Kemudian peneliti akan mengelompokkan data sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data utama yaitu wawancara dengan narasumber.

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan tersebut kemudian diberikan penafsiran dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan data-data yang ada, peneliti akan menjelaskan setiap indikator dari koordinasi. Penelitian terhadap koordinasi dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin dianggap penting karena penelitian ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan didalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Penilaian koordinasi dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin adalah upaya yang digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap koordinasi agar bisa diterapkan dengan lebih terarah dan lebih sistematis. Koordinasi bisa dilihat dari berbagai indikator seperti kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja.

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan program mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan program. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi intruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat.

Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasikan suatu kesatuan yang harmonis. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan program untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan program tersebut dan mengurangi ketidakefisienan serta konflik yang merusak. Keberhasilann pelaksanaan program tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan program untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan.

Tingkat efektivitas pelaksanaan program hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggaraan program. Oleh karena itu, kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadi tingkat efektivitas pelaksanaan program menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan program dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan manajemen sasaran.

Agar koordinasi dapat dicapai dengan efektif dan memiliki potensi yang lebih tinggi maka perlu diketahui metode untuk mencapai arah tersebut.

Menurut McBarnes (1998) ada 3 kaidah yang harus dipenuhi dalam koordinasi yaitu :

- a) Harus adanya kontak langsung mereka yang kegiatannya harus di koordinasi

- b) Koordinasi harus dimulai dari tahap awal sebelum kebijaksanaan dibentuk secara lengkap

- c) Koordinasi harus merupakan suatu proses yang berkelanjutan

### 1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya dalam sebuah organisasi diperlukannya kesadaran dari setiap anggota organisasi dan satuan organisasi guna saling menyesuaikan diri atau tugasnya. Hal ini diharapkan agar anggota dan satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep dari kesatuan tidak merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin dalam memperoleh koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang telah direncanakan bersama anggota organisasi dan satuan organisasi, sehingga terdapat keserasian untuk mencapai hasil (Hassibuan 2006:88).

Dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh para implementor dalam bentuk menentukan waktu pendistribusian beras raskin kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang masih sangat kurang karena dari pihak Kecamatan hanya menyerahkan langsung untuk waktu pendistribusiannya kepada kepala Desa. pemerintah kecamatan tidak menentukan dan menetapkan kapan akan di distribusikan beras raskin bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu tersebut. Bahkan kepala Desa pun tidak menentukan langsung waktunya hanya menunggu ada waktu makan beras tersebut aka di distribusikan kepada masyarakat. Pendistribusian beras kepada masyarakat menjadi terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

### 2. Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi (penerima) tidak hanya vital

dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sasaran penting melalui kegiatan organisasi. Komunikasi adalah alat pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikasi agar antara mereka dapat interaksi. Komunikasi adalah satu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan pengertian dan persatuan kelompok. Aktifitas komunikasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Apabila kajian komunikasi dihubungkan dengan organisasi timbul suatu kajian tentang komunikasi organisasi. Organisasi merupakan salah konteks penting dalam komunikasi.

Menurut Hassibuan (2006:88) Kata komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yang dalam bahasa latinnya mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan. Pada hakekatnya komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi guna meningkatkan hubungan pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan nama koordinasi, karena komunikasi merupakan unit dalam organisasi untuk dapat dikoordinasikan rentang dimana sebagai besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

Faktor komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Agar implementasi berjalan efektif, maka mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti terlebih dahulu tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Dalam hal ini komunikasi sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam proses pelaksanaan program raskin tersebut. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan.

Hari Fabrian

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Komunikasi yang dilakukan pihak kecamatan dalam bentuk sosialisai dalam pelaksanaan beras untuk rumah tangga miskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang masih sangat kurang, dimana pemerintah kecamatan hanya mensosialisasikan program beras untuk rumah tangga miskin ini hanya kepada kepala Desa tidak langsung kepada masyarakat. Pemerintah Desa diundang untuk mengikuti sosialisasi beras miskin bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang beras raskin. Masyarakat hanya mengetahui dari kepala Desa namun tidak secara langsung, kepala Desa hanya menyampaikan kepada masyarakat jika bertemu jika kalau sedang berjalan dengan masyarakat yang berhak menerima beras raskin tersebut. Masyarakat yang menerima raskin pun tidak pernah menerima pengumuman mengenai raskin. Hanya mengetahui informasi tersebut dari satu orang ke orang yang lain.

### 3. Pembagian Kerja

Tujuan organisasi adalah mencapai tujuan bersama, dimana individu tidak dapat menyelesaikan dengan sendiri. Organisasi pada dasarnya mempunyai prinsip dalam pembagian kerja (*division of labor*). Prinsip pembagian kerja merupakan tujuan dalam suatu organisasi untuk dapat menghasilkan dengan baik dalam mencapai tujuan usaha yang hendak dilakukan dengan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan, agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi

menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi.

Dalam pembagian kerja para implementor masih sangat kurang dimana pihak kecamatan tidak menunjuk langsung petugas-petugas untuk pendistribusiannya kepada masyarakat. Perlunya koordinasi dari pihak kecamatan dalam pembagian kerja menentukan keberhasilan program raskin ini. Adanya pembagian kerja yang jelas sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

#### **D. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum terlaksana secara optimal, adapun faktor yang dimaksud yaitu :

##### **1. Kesatuan Tindakan**

Dalam pelaksanaan raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang masih kurangnya kesatuan tindakan yang dilakukan oleh implementor. Agar koordinas berjalan baik dan efektif setiap organisasi harus memiliki konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan

mengkehendaki bahwa setiap implementor diperlunya kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan tugasnya. Sebagai seorang pemimpin untuk memperoleh koordinasi yang baik harus mengatur jadwal yang telah di rencanakan bersama bawahannya. Hal tersebut agar para implemntor tidak berjalan sendiri dalam pelaksanaan program raskin ini. Sehingga, dalam pelaksanaan pendistribusiannya kepada masyarakat tepat waktu. Hal tersebut dapat di ketahui dari pernyataan Kepala Desa bahwa untuk jadwal pendistribusiannya kepada masyarakat Pihak kecamatan tidak menentukan jadwal pendistribusiannya.

##### **2. Komunikasi**

Dalam pelaksanaan raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang komunikasi yang dilakukan para implementor masih kurang. Pada hakekatnya komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi guna untuk meningkatkan hubungan pemimpin dan bawahan dalam pelaksanaan tugas. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai raskin tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran penerima raskin dan pihak yang terkait. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang program raskin ini di sebabkan karena dari pihak kecamatan hanya melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa saja tidak langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berhak menerima raskin. Hal tersebut dapat di ketahui dari pernyataan masyarakat yang sebagian besar menyatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan mengenai program raskin ini. Apabila sosialisasi kurang efektif maka penyampaian substansi kebijakan tidak dapat tercapai sehingga apa yang sebenarnya diharapkan

dari kebijakan tidak dapat teralisasi pula secara efektif.

### 3. Pembagian Kerja

Dalam pelaksanaan raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang pembagian kerja dalam proses pendistribusiannya kepada masyarakat masih kurang. Prinsip pembagian kerja merupakan tujuan dalam suatu organisasi untuk dapat menghasilkan dengan baik dalam mencapai tujuan usaha yang hendak dilakukan dengan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan, agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Pembagian kerja masih dikatakan kurang dapat di ketahui dari pernyataan Kepala desa bahwa pihak kecamatan hanya menyerahkan langsung tugas kepada Kepala desa dalam pendistribusiannya kepada masyarakat sebagai penerima raskin.

### 2. Implikasi

secara teoritis, impikasi dari hasil penelitian yang berjudul Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang merupakan saran yang baik dalam bentuk media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan, pemahanan, dan pengalaman penulis dalam membentuk sebuah karya tulis ilmiah atau hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini telah mengetahui bagaimana proses koordinasi raskin dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam proses pelaksanaan raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hassibuan (2006:88) mengungkapkan agar koordinasi itu berjalan baik dan efektif sehingga tujuan tercapai, maka ada 3 variabel yang harus

diperhatikan yaitu mencakup kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja. Berdasarkan teori Hassibuan tersebut sanagat tepat untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu pemerintahan khususnya membahas kajian koordinasi, karena menjelaskan koordinasi antar organisasi yang baik demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian penelitian ini berimplikasi menjadi bahan bacaan dan literatur bagi penulis atau pihak yang mengkaji permasalahan tentang koordinasi dalam sebuah organisasi atau koordinasi dalam sebuah program.

### 3. Saran

Berdasarkan hasil hasil penelitian yang telah dilakukan penulis merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar kedepannya proses koordinasi dalm pelaksanaan program raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang lebih baik dan efektif. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Kesatuan tindakan dalam proses pendistribusiannya kepada masyarakat dalam bentuk menentukan waktu pendistribusiaanya harus terencana dengan baik, sehingg dalam pendistribusiannya tidak mengalami keterlambatan.
2. Komunikasi dalam pelaksanaan program raskin di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang harus ditingkatkan kembali dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada para implementor saja tetapi juga kepada masyarakat yang menerima raskin sehingga kejelasan program raskin ini diketahui oleh masyarakat mengenai tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian maka program raskin ini makan mendapatkan hasil yang baik dan efektif dalam pelaksanaanya.

3. Pembagian kerja yang jelas dan sistematis oleh para implementor pelaksanaan program raskin harus di tingkatkan kembali. Karena dengan demikian maka para implementor tidak bekerja sendiri dalam proses raskin ini.

#### 4. Keterbatasan Peneliti

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dirasakan penulis sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan. Keterbatasan yang dialami penulis dalam proses penelitian adalah :

1. Kurangnya keterampilan penulis dalam merangkai kalimat menyebabkan penulis mengalami kesulitan untuk menuangkan pikiran-pikiran ke dalam bentuk tulisan.
2. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang” masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan karena penulis sendiri masih tergolong baru untuk melakukan penelitian ilmiah. Kelemahan tersebut khususnya pada keterbatasan dalam melakukan wawancara, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta. Bumi Aksara.

Hasibuan, 2007. *Manajemen Dasar pengertian dan masalah*, Jakarta. Bumi Aksara

Nurecholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.

Reho, Bernerd. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustakarya.

Sedemanyanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan yang baik) bagian dua*, Bandung. Mandar Maju.

Siagian, Sondang.P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Astra.

Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosilogi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Pesada.

Soemantri. Sri. 1976. *Sistem Pemerintahan ASEAN*. Bandung. Transito

Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pusat Pelajar

Soewarno, Hadayaningrat, 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Management*, Jakarta : Gunung Agung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung Alfabet.

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

#### Skripsi :

Listiana Padagi. 2012. *Pelaksanaan koordinasi pemerintah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah desa di desa batu tajam kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang*. Universitas Tanjungpura

Yusuf Tri Anggoro. 2006. *Studi Kasus Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. Semarang

**Undang-Undang :**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat  
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk  
Pelaksana Program Beras Untuk Rumah  
Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 6 Tahun  
2013 Tentang Petunjuk Teknis Program  
Beras Untuk Rumah Tangga Miskin  
Kabupaten Ketapang.

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2006  
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi  
Kecamatan Kabupaten Ketapang

Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun  
2002 Tentang Ketahanan Pangan

**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.**  
Tentang Pemerintah Daerah

**Intruksi Presiden No. 8 Tahun 2008.**  
Tentang Kebijakan Perberasan Nasional

